

## KERJASAMA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Abdul Kadir Arno

**Abstrak:** MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif regional lainnya. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan

**Keyword:** Masyarakat Ekonomi Asean

### Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Pertumbuhan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. hingga pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen. Negara Indonesia termasuk salah satu anggota ASEAN.

ASEAN merupakan suatu organisasi perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Tahun 2015, ASEAN merencanakan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, Dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan standar hidup masyarakat. Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu dalam menyambut pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai pada tahun 2015.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia harus dapat mengetahui apa itu MEA dan memiliki pengetahuan yang mendalam, dengan

berbagai program sosialisasi yang harus dilaksanakan pemerintah dan para relawan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang MEA. Sehingga masyarakat dapat mempersiapkan segala pembekalan yang akan dikembangkan untuk dapat bersaing di MEA, dan yang diharapkan masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan unggul dan mendominasi segala potensi dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang ekonomi. Selain itu jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dibandingkan Negara ASEAN lainnya dapat menjadi peluang yang besar pula.<sup>2</sup>

Dalam ekonomi internasional yang liberal seperti sekarang ini maka otoritas pemerintah untuk menghadang barang dari luar atau bahkan orang asing yang akan masuk bekerja ke dalam teritorial domestik jelas tidak dimungkinkan lagi. Meskipun dasar untuk menghadang pergerakan itu adalah demi kepentingan nasional. Zaman perlindungan dengan menghadang atau

---

<sup>1</sup> Humphrey Wangke, Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Journal Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014, hlm 5

---

<sup>2</sup> Ahmad Yaris Firdaus dan Muhammad Andi Hakim, Penerapan “*Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources*” Dengan Pengetahuan, Pengembangan, Dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia Di Mea 2015, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Journal Unnes ISSN 2252-6889, tahun 2013, hlm 153

menghambat apakah dengan alasan tarif atau alasan lain non tarif menjadi sesuatu yang dianggap mengada-ada dan yang pasti melanggar kesepakatan perdagangan bebas. Dengan kondisi seperti itu maka penanam modal asing diberi kemudahan dan keleluasaan untuk memindah-mindahkan investasinya kemanapun sesuai dengan perhitungan mereka mengenai akumulasi laba dan efisiensi dari bisnisnya. Andaikan segala peraturan dan kondisi nyata dari harga upah buruh, keamanan, pengurusan ijin Dan lainnya dipertimbangkan menempati skala kesulitan tinggi sedangkan masuknya barang ke Indonesia relatif mudah termasuk jaringan distribusi yang dikuasai.<sup>3</sup>

Masyarakat Ekonomi Asean dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global.

Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari para pembuat kebijakan hingga masyarakat umum sangatlah diperlukan untuk memastikan kesiapan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi pasar bebas yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean ini. Berbagai diskusi atau seminar sudah dilakukan pemerintah dengan melibatkan para pakar dari berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna memastikan kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 yang menuntut efisiensi dan keunggulan produk yang lebih kompetitif dan inovatif. Meski Masyarakat Ekonomi Asean dipandang sebagai sebuah peluang positif bagi perkembangan ekonomi nasional, namun sejumlah tantangan dan hambatan klasik yang terus menghantui Indonesia dari waktu ke waktu mesti segera diatasi. Hambatan dan tantangan mendasar yang perlu dibenahi pemerintah saat ini, antara lain mencakup masalah yaitu

<sup>3</sup> Arie Chandra dan Atom Ginting Munthe, *Profil Kesiapan Daerah Dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Unpar, 2012, hlm. 14

infrastruktur, birokrasi, masalah kualitas sumber daya manusia dan masalah perburuhan, sinergi kebijakan nasional dan daerah, daya saing pengusaha nasional, korupsi dan pungutan liar yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*).<sup>4</sup>

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyepakati pembebasan arus barang, jasa, tenaga kerja, investasi dan modal. Kesepakatan tersebut diperkuat dengan penghapusan tarif perdagangan antar negara ASEAN. Hal ini berarti akan ada pergerakan barang dan jasa di kawasan ASEAN.<sup>5</sup> Modal tidak mengenal bendera (*capital carriers no flag*) negara dan tidak mengenal ideologi. Di bidang perdagangan, melahirkan saling ketergantungan yang makin erat sehingga mengarah pada integrasi ekonomi dunia. Inilah sekiranya gambaran umum globalisasi ekonomi yang terbungkus rapi dalam bentuk liberalisasi, kapitalisasi dan neoliberalisasi di bidang ekonomi. Hal ini menyisakan tanda tanya besar sampai sekarang bagi para pakar dan pengamat ekonomi, politik, ekologi, dan sosial budaya dalam menyikapi komunitas ASEAN secara kritis. Terlebih untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia, dimana Indonesia merupakan salah satu anggota komunitas tersebut.<sup>6</sup>

Para penanam modal (investor) diundang masuk ke suatu negara dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian. Pendirian suatu rumah sakit dibutuhkan modal yang tidak sedikit jumlahnya, untuk dapat mendirikan suatu rumah sakit tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama antara para investor asing maupun lokal.

<sup>4</sup> Aisyah Mayasari, "*Masyarakat Ekonomi ASEAN*", <http://aisyahmayasari.blogspot.com>, diakses tanggal 17 Februari 2015

<sup>5</sup> Setia Zain, "*Masyarakat Ekonomi ASEAN Tantangan di Indonesia*", <http://www.finansialku.com/masyarakat-ekonomi-asean-tantangan-indonesia>, diakses tanggal 17 Februari 2015

<sup>6</sup> Adhitya Pratama, "*Analisis Kritis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*", <http://adhityache.blogspot.com> diakses tanggal 17 Februari 2015

Penanaman modal yang sumber modalnya berasal dari luar negeri merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai penanaman modal. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 1 menyebutkan "penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia".

Para penanam modal (investor) diundang masuk ke suatu negara dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian nasional sehingga mampu mempercepat proses pembangunan nasional. Tujuan dari para penanam modal dalam menanamkan modalnya adalah untuk mencari keuntungan (profit oriented), sehingga para penanaman modal tersebut membutuhkan suatu kepastian hukum dan rasa aman dalam menempatkan modalnya dalam suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan kepastian hukum yang lebih besar ketimbang negara-negara maju guna menjamin perdagangan internasional yang terbuka dan adil. Tujuannya adalah untuk menarik penanam modal agar mau menanamkan modalnya, maka pemerintah sudah siap terhadap hal-hal yang dibutuhkan bagi para penanam modal tersebut. Dengan demikian maka tugas dari pemerintah adalah mempersiapkan perencanaan yang matang, untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi para penanam modal dengan jalan menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif pada kegiatan penanaman modal, sehingga dapat diarahkan pada prioritas pembangunan nasional.

### Sejarah Singkat Pembentukan MEA

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya

aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)". Cetak Biru AEC/MEA tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal).
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM)
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM Dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI)
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global *supply network*).<sup>7</sup>

Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Dengan

<sup>7</sup> Ridwan Sidin Hajatin, "Persiapan Indonesia Menuju AEC", <http://www.kompasiana.com/>, diakses tanggal 29 April 2015

demikian, para pemimpin sepakat untuk mentransformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal yang lebih bebas.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (1) pasar tunggal dan basis produksi; (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (3) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (4) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga memiliki lima pilar utama, yakni: (1) Aliran bebas barang (*free flow of goods*) (2) Aliran bebas jasa (*free flow of service*) (3) Aliran bebas investasi (*free flow of investment*) (4) Aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*) dan (5) Aliran bebas modal (*free flow of capital*).<sup>8</sup>

Inisiatif pembentukan integrasi ASEAN sebenarnya telah muncul pada 1997. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN *Second Informal Summit* di Kuala Lumpur, Malaysia. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk roadmap jangka panjang yang bernama Hanoi Plan of Action yang disepakati pada 1998.

1. Kemudian melalui deklarasi Bali Concord II pada 2003 di Bali, Komunitas ASEAN 2020 diimplementasikan melalui 3 pilar, yakni ASEAN *Security Community*, ASEAN *Economic Community*, dan ASEAN *Socio-Cultural Community*. Namun, pada saat ASEAN Summit ke-12 pada 2007, dalam Cebu Declaration, ASEAN memutuskan untuk mem-percepat pembentukan integrasi kawasan ASEAN menjadi 2015
2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hadir untuk menggantikan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang telah ada sejak tahun 2003. AFTA disahkan pada

saat ASEAN Summit ke IV di Singapura pada Januari 1992 bersama penandatanganan Deklarasi Singapura dan Perjanjian untuk Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN (*Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation*). Kehadiran AFTA juga telah menjadi pembuka pintu liberalisasi dengan Negara-negara di luar anggota ASEAN melalui pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dengan beberapa Negara mitra seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, dan India.

3. Dengan berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA), maka secara otomatis telah mengikat komitmen Negara-negara anggota ASEAN untuk juga bermitra secara bilateral. Indonesia telah mengadopsi ASEAN Free Trade Area (AFTA) ke dalam hukum nasional yang dilanjutkan dengan menandatangani perjanjian perdagangan secara bilateral antara Indonesia dengan keenam Negara mitra ekonomi ASEAN, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, dan India.
4. Pembentukan basis produksi ASEAN akan mendorong kebutuhan pasar tenaga kerja yang sangat besar. Industrialisasi akan menjadi strategi utama yang semakin memperkuat peran korporasi multinasional. Berbagai kebijakan tenaga kerja Indonesia akan didorong untuk dapat memenuhi kepentingan industri seperti penciptaan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan mampu meningkatkan produktifitas industri.<sup>9</sup>

### Tujuan Pembentukan MEA

Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Memang tujuan

<sup>8</sup> Widodo Suryandono, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015", diakses tanggal 29 April 201

<sup>9</sup> Lusi Agustina Sinaga, "Pemahaman Tentang Masyarakat Ekonomi Asean 2015", diakses <http://pemahamanmaeblogspot.com.html>, tanggal 28 April 2015

dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi permasalahan di bidang ekonomi antar negara ASEAN.

ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok, di mana terdiri dari 10 Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta persaingan Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN.

Pada KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015. Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Tidak hanya dampak, ada beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi MEA.

Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia.

Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infra-

struktur, dan sektor industri.<sup>10</sup> Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tampaknya menyetarakan integrasi ekonomi kawasan semata-mata dengan sesederhana dan cepatnya liberalisasi. Tidak jelas, apakah keuntungan integrasi kawasan diperuntukkan bagi kawasan ini (ASEAN). Dengan tujuan berselaras dengan aturan-aturan internasional, tampaknya Masyarakat Ekonomi ASEAN hanya sebuah rancangan sehingga anggota ASEAN dapat meliberalisasi lebih cepat. Cetak biru tersebut lebih kuat dalam usahanya mengakses pasar eksternal (menjadikan ASEAN sebuah kawasan kompetitif, meliberalisasi seluruh area ekonomi) ketimbang usaha pengembangan sebuah pasar kawasan di dalamnya (internal). Hanya sektor-sektor integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah tujuan ambisius yang sayangnya dikembangkan tanpa konsultasi berarti dengan sektor-sektor ekonomi yang berbeda di kawasan ini. Sebagai hasilnya, cetak biru yang dirancang untuk mendukungnya bersifat agak teknis dan tidak memberikan pelaku ekonomi umum menemukan peran penting mereka di dalamnya. Pelaku-pelaku ekonomi besar dan bisnis mungkin berada pada posisi untuk mengambil keuntungan dari kebijakan dan proyek-proyek yang diperhitungkan di dalam cetak biru tersebut, namun cetak biru ini kekurangan banyak kebijakan dan proyek lainnya yang dapat membantu produsen dan bisnis/usaha kecil mengatasi integrasi prioritas saja yang secara khusus menjadi sasaran dukungan kawasan dan pembangunan pasar internal (“made in ASEAN” = buatan ASEAN), namun tetap saja harus dilihat bagaimana upaya ini berhasil.

Cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak memasukkan diskusi bagaimana belajar dari pertumbuhan ekonomi dan pengalaman pembangunan dari negara-negara ASEAN yang lebih maju. Contohnya, cetak biru ini tidak membahas bagaimana dukungan perlindungan diberikan oleh Malaysia, Thailand, dan Indonesia membantu mengembangkan industri mereka

---

<sup>10</sup>Melania Kiswandari, “Pahami Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, <http://national-geographic.co.id>, diakses tanggal 17 April 2015

atau bagaimana investasi besar Singapura pada jasa-jasa publik dan infrastruktur penting dalam pembangunan pasar internal negara ini. Cetak biru ini malah membicarakan penghapusan seluruh mekanisme perlindungan tersebut (contohnya persyaratan kinerja dan peraturan nasional menjadi hambatan non-tarif) dan menarik sektor swasta. Sementara menyebutkan perlindungan konsumen dan kebijakan kompetisi, namun cetak biru ini tidak menjelaskannya lebih lanjut. Transparansi dan akses ke informasi, peran serta masyarakat juga tidak dibahas sebagai bagian dari upaya perlindungan ini.

Gagasan Masyarakat Ekonomi ASEAN memberi berbagai kemungkinan menarik bagi rakyat di kawasan ini. Pengertian komunitas mengacu pada kerja sama dan rakyat secara bersama-sama, bekerja bersama, dan saling membantu. Gagasan Pasar Tunggal dan basis produksi juga dapat bermakna bahwa para produsen ASEAN meningkatkan interaksi dan pertukaran di antara mereka, dan bersikap pada pentingnya saling berkompetisi. Hal ini dapat juga berarti produk-produk kawasan yang dihasilkan oleh produsen dari negara-negara berbeda dapat dipromosikan.

Namun, cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini bukanlah cetak biru untuk masyarakat. Karena jika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ingin benar-benar relevan, ia harus berorientasi dan lebih banyak melibatkan rakyat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Tekanan bagi pertumbuhan akan didamba jika motivasinya adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat biasa dan komunitas umumnya. Sebuah masyarakat yang nyata adalah sebuah komunitas yang merangkul rakyat biasa, dan menyatukan aspirasi solidaritas dan kerja sama mereka.

Tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah terciptanya kawasan ekonomi ASEAN yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. "MEA merupakan realisasi misi 2020 untuk menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi dalam bentuk pasar tunggal dan basis industri bersama. Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta

diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. Selama hampir dua dekade ASEAN terdiri dari hanya lima negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang pendiriannya pada tahun 1967.<sup>11</sup>

### **Ruang Lingkup Kesepakatan dalam MEA**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu dari pilar-pilar impian Masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Masih ada keleluasaan, pengecualian dan hambatan hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal) dalam liberalisasi ini, dan para anggota yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan sektor tersebut. Namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh Anggota harus memiliki komitmen yang sama.

Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota ASEAN, bukan hanya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang (produk) nasional. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh terampil dan para profesional akan bebas

<sup>11</sup> G.T. Suroso, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia", diakses <http://www.bppk.kemenkeu.go.id.html>, tanggal 28 April 2015

melakukan pekerjaan mereka di mana saja di ASEAN.

Untuk memfasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat, Masyarakat Ekonomi ASEAN memfokuskan dua wilayah khusus, yaitu: sektor-sektor integrasi prioritas, pangan, pertanian dan kehutanan. Ada 12 (dua belas) sektor integrasi prioritas, yaitu: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah sektor-sektor yang paling diminati anggota ASEAN, dan menjadi tempat mereka berkompetisi satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasi penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu), anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan outsourcing), serta membantu mengembangkan produk-produk “buatan ASEAN”.

Fokus khusus pada pangan, pertanian dan kehutanan berkaitan dengan bagaimana mengembangkan sebuah sektor yang dipertimbangkan paling sensitive oleh anggota ASEAN. Karena hal ini akan diintegrasikan dalam sebuah pasar tunggal, Cetak Biru Masyarakat. Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) adalah kerangka ekonomi utama di ASEAN. AFTA diterapkan melalui Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang mencairkan semua tarif bakal dihapus sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk Cambodia-Lao PDR-Myanmar-Vietnam (CLMV) Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Seluruh produk sensitif akan dimasukkan dalam skema tersebut sebelum tahun 2018.

Di samping AFTA, sebagai sebuah kawasan ASEAN juga terlibat dalam tujuh kesepakatan perdagangan bebas lainnya, yaitu:

1. Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN China (ACFTA) sebuah Program Panen Awal (Early Harvest Program), suatu program untuk mengatur perdagangan buah-buahan dan sayuran. Saat ini program tersebut sedang dilaksanakan di

Filipina, Indonesia, dan Thailand; sementara perundingan di negara lainnya sedang dalam tahap penyelesaian.

2. ASEAN-Korea (AKFTA) – perjanjian ini sudah ditandatangani, kecuali oleh Thailand
3. ASEAN Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) (Kemitraan Ekonomi Menyeluruh ASEAN Jepang) perundingan telah diselesaikan dan kesepakatannya di harapkan akan ditandatangani awal 2008. ASEAN India Regional Trade and Investment
4. Area-perundingan-perundingan dalam hal barang diharapkan selesai sebelum Mei 2008
5. ASEAN Australia and New Zealand (AFTA) perundingan-perundingan ini masih berjalan ASEAN *European Union* (AFTA) sebuah deklarasi bersama telah ditandatangani pada November 2007 tetapi perundingannya belum dimulai East Asia Free Trade Area (EAFTA) masih dalam konsultasi dan studi/penelitian.<sup>12</sup>

AFTA merupakan bagian agak kecil dari perdagangan di dalam ASEAN dan total perdagangan ASEAN, dan tetap dipandang apakah kawasan perdagangan bebas ini akan meningkat nilainya sebelum 2015. Kesepakatan dengan negara-negara lain mungkin hanya mencakup lebih sedikit produk dan masa pemberlakuan yang lebih panjang. Lagi pula, petunjuk umum menyebutkan membuka perdagangan dengan negara-negara tersebut secara progresif. Isu utama bagi petani adalah bagaimana kawasan-kawasan perdagangan bebas (FTA) ini berdampak pada pertanian lokal. Contohnya, penelitian awal pada *Early Harvest Program* ACFTA antara ASEAN China FTA, menunjukkan adanya dampak besar pada petani Thailand dan Indonesia.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Andriaditya, “Indonesia dan AFTA”, <https://andriaditya.wordpress.com> tanggal 28 April 2015

<sup>13</sup> Yuda Prayintno, “*Pendahuluan Kawasan ASEAN Memiliki Strategis MEA*”, <http://kangyuda.blogspot.com.html>, diakses tanggal 28 April 2015

### Kesepakatan Investasi dalam MEA

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan asia tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing asean meningkat serta bisa menyaingi cina dan india untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi Asean ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh asia tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan barang dan jasa serta tenaga kerja. Memang tujuan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah jepang dan tiangkong, di mana terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin asean dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) pada desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Pada KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015. Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Dede Rahmat Hidayah, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015", <http://dederahmathidayah.blogspot.com.html>, diakses tanggal 28 April 2015

Potensi investasi yang cukup besar di ASEAN merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh ASEAN. Namun ternyata kemudahan dan daya tarik investasi antar sesama negara ASEAN cukup beragam. Indonesia sendiri perlu lebih meningkatkan peringkat kemudahan investasi yang cukup rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Negara sumber investasi di ASEAN yang tertinggi adalah negara di kawasan Uni Eropa yang saat ini tengah dilanda krisis, untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan investasi yang masuk ke ASEAN karena krisis tersebut, ASEAN perlu menarik investasi yang lebih besar dari kawasan lain. Hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam ASEAN Investment Forum yang terkait dengan promosi investasi, pelayanan investasi, *after-care for investment*, insentif fiskal dan non-fiskal, *co-investment*, dan *Public-Private Partnership* sebagai langkah-langkah strategis dalam menarik investasi ke ASEAN, bila dilaksanakan dengan tepat akan dapat meningkatkan investasi ke kawasan ASEAN. Melalui ASEAN Investment Forum yang berperan secara intensif, diharapkan sesama negara ASEAN dapat saling membantu perkembangan investasi dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan tujuan investasi utama.<sup>15</sup>

Setelah mengalami pembahasan yang cukup alot sejak tahun 2006, ASEAN akhirnya berhasil menyelesaikan pembahasan ASEAN *Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*. Draft ACIA dimaksud telah dibahas dan di-endorse pada Pertemuan ke-40 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2008.

Dengan ditandatanganinya ACIA, diharapkan akan dapat menjadikan ASEAN menjadi wilayah yang sangat Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Ke-40 yang berlangsung di Singapura bulan Agustus tahun 2008 lalu, negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk suatu rejim investasi ASEAN yang lebih terbuka

<sup>15</sup> Yuda Prayintno, "Pendahuluan Kawasan ASEAN memiliki strategis MEA", <http://kangyuda.blogspot.com.html>, diakses tanggal 28 April 2015

serta mendukung proses integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Rejim yang dimaksud adalah ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) yang merupakan hasil revisi dan penggabungan dari ASEAN *Investment Area* (AIA) dan ASEAN *Investment Guarantee Agreement* (ASEAN-IGA). ACIA mencakup empat pilar utama yang meliputi: *liberalisation, protection, facilitation and promotion*. ACIA lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan AIA dan ASEAN IGA, dikarenakan ACIA telah mengadopsi international best practices dalam bidang investasi dengan mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan investasi internasional. Dengan adanya ACIA, diharapkan ASEAN dapat meningkatkan iklim investasi di kawasan dan menarik lebih banyak investasi asing, kompetitif untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) serta mendukung realisasi ASEAN *Economic Community*.

Melalui ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) yang berlaku tanggal 29 Maret 2012, ASEAN mencoba mewujudkan elemen-elemen tersebut di atas. ACIA bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi di ASEAN yang bebas, fasilitatif, transparan, dan kompetitif. Empat pilar utama

ACIA, yaitu liberalisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi. ACIA merupakan hasil proliferasi dari ASEAN *Investment Guarantee Agreement* (ASEAN IGA) dan *the Framework Agreement on ASEAN Investment Area* (AIA *Framework Agreement*). Implementasi ACIA merupakan fokus kerja sama ASEAN di bidang investasi. Pertemuan ke-45 AEM di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada Agustus 2013 lalu, telah mengesahkan *Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Protokol tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan amandemen terhadap ACIA *Schedule* dan mendelegasikan tanggungjawab melakukan amandemen dari AEM kepada ASEAN *Investment Area* (AIA) *Council*.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Anonim, *Asean* <http://www.kemlu.go.id> diakses tanggal 28 April

## Simpulan

Dalam Pertemuan KTT di Bali Tahun 2003 menyepakati pembentukan Komunitas Ekonomi Asean (AEC) yang diwujudkan pada tahun 2020. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang dan jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas, pada Tahun 2007, dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Hanoi. Para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. Adapun dalam cetak biru MEA memuat 4 kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan ecommerce.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

## Daftar Pustaka

- Adhitya Pratama, "Analisis Kritis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", <http://adhityache.blogspot.com> diakses tanggal 17 Februari 2015
- Ahmad Yaris Firdaus dan Muhammad Andi Hakim, *Penerapan "Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources" dengan Pengetahuan, Pengembangan, dan Persaingan*

- Sebagai Langkah dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia Di Mea 2015*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Journal Unnes ISSN 2252-6889, tahun 2013, hlm 153
- Aisyah Mayasari, “Masyarakat Ekonomi ASEAN”, <http://aisyahmayasari.blogspot.com>, diakses tanggal 17 Februari 2015
- Andriaditya, “Indonesia dan AFTA”, <https://andriaditya.wordpress.com> tanggal 28 April 2015
- Anonim, *Asean* <http://www.kemlu.go.id/> diakses tanggal 28 April 2015
- Arie Chandra dan Atom Ginting Munthe, *Profil Kesiapan Daerah Dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Unpar, 2012, hlm. 14
- Dede Rahmat Hidayah, “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015”, <http://dederahmathidayah.blogspot.com.html>, diakses tanggal 28 April 2015
- G.T. Suroso, “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia”, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id> diakses tanggal 28 April 2015
- Humphrey Wangke, *Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Kajian singkat terhadap Isu-isu Terkini*, Journal Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014, hlm 5
- Lusi Agustina Sinaga, “Pemahaman Tentang Masyarakat Ekonomi Asean 2015”, <http://pemahamanmae.blogspot.com>. diakses tanggal 28 April 2015
- Melania Kiswandari, “Pahami Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, <http://nationalgeographic.co.id> diakses tanggal 17 April 2015
- Ridwan Sidin Hajatin, “Persiapan Indonesia Menuju AEC”, <http://www.kompasiana.com> diakses tanggal 29 April 2015
- Setia Zain, “Masyarakat Ekonomi ASEAN Tantangan di Indonesia”, <http://www.finansialku.com> diakses tanggal 17 Februari 2015
- Widodo Suryandono, “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 /diakses tanggal 29 April 201
- Yuda Prayintno, “Pendahuluan Kawasan ASEAN Memiliki Strategis MEA”, <http://kangyuda.blogspot.com.html>, diakses tanggal 28 April 2015
- Yuda Prayintno, “Pendahuluan Kawasan ASEAN memiliki strategis MEA”, <http://kangyuda.blogspot.com.html>, diakses tanggal 28 April 2015